

DILEMA KEBIJAKAN LUAR NEGERI SINGAPURA KAWASAN ASIA TENGGARA DALAM RIVALITAS PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-CINA

***Nasywa Alfia KH Furqon¹, Muhammad Arsy Ash Shiddiqy²**

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: nasywaalfiakfurqon@student.uir.ac.id

ABSTRACT

Foreign policy can describe how a country's attitude is in facing the international political situation that aims to achieve its national interests. The purpose of this study is to analyze how Singapore's attitude is in facing the rivalry between the United States and China in the trade war conflict through its foreign policy. This study also attempts to find factors that can influence Singapore's foreign policy in the midst of the conflict. The method used in this study is a qualitative method based on the foreign policy theory according to K.J. Holsti. The results of this study indicate that until now Singapore still maintains the principle of its pragmatic and neutral foreign policy by not siding with any of the great powers. The factors that influence Singapore's foreign policy in the rivalry between the United States and China are considered based on economic factors, security, and regional stability.

Keywords: Foreign Policy; Trade War; Balance of Power

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, kawasan Asia Tenggara telah menjadi salah satu wilayah paling dinamis dalam percaturan politik dan ekonomi global. Letaknya yang strategis yakni berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta memiliki sumber daya yang melimpah, menjadikan kawasan ini sebagai arena persaingan kepentingan antara kekuatan besar dunia, khususnya Amerika Serikat dan Cina. Rivalitas yang semakin intens antara kedua negara adidaya ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral mereka, tetapi juga menciptakan tekanan dan dilema kebijakan luar negeri bagi negara-negara kecil di Kawasan Asia Tenggara, salah satunya adalah Singapura.

Singapura merupakan negara yang memiliki peran signifikan bagi Kawasan Asia Tenggara, walaupun luas wilayah dan jumlah penduduknya tergolong kecil. Sejak meraih kemerdekaannya pada tahun 1965, Partai Aksi Rakyat (PAP) terus mendominasi dunia politik Singapura. Dominasi tersebut telah membentuk budaya politik yang khas dan berfokus pada stabilitas, efisiensi pemerintahan, perencanaan jangka panjang, dan sistem kesetaraan. Masyarakat Singapura merupakan campuran beragam etnis termasuk Tionghoa, Melayu, India, dan kelompok minoritas lainnya dengan berbagai kepercayaan agama. Pemerintah Singapura menempatkan pengelolaan keberagaman tersebut sebagai fokus utama dalam politik domestiknya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan antar etnis dan agama yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan toleransi antar masyarakatnya. Sejak kemerdekaannya, Singapura berhasil membangun citra sebagai negara maju dengan ekonomi yang kuat, stabilitas politik yang terjaga, serta diplomasi luar negeri yang aktif dan strategis. Dalam konteks hubungan internasional, Singapura dikenal dengan prinsip kebijakan luar negerinya yang pragmatis dan berbasis pada kepentingan nasional. Pendekatan

ini memungkinkan Singapura untuk menjalin hubungan yang seimbang dengan berbagai negara, termasuk dengan dua kekuatan besar dunia saat ini yakni Amerika Serikat dan Cina.

Namun, semakin tajamnya persaingan antara Amerika Serikat dan Cina baik dalam konflik perang dagang menempatkan Singapura dalam posisi yang sulit dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Di satu sisi, Cina merupakan mitra dagang terbesar bagi Singapura dan memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan di Kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, Amerika Serikat adalah sekutu tradisional dalam bidang keamanan dan pertahanan, serta memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kondisi ini menciptakan dilema kebijakan luar negeri yang kompleks bagi Singapura, di mana setiap keputusan politik luar negeri dapat berimplikasi besar terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasionalnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Singapura menyikapi dilema tersebut melalui kebijakan luar negerinya. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana prinsip pragmatisme mampu diterapkan oleh Singapura dalam merespons rivalitas Amerika Serikat dan Cina tanpa harus berpihak secara eksplisit pada salah satu kekuatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, penelitian ini akan mengungkap faktor-faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam kebijakan luar negeri Singapura, khususnya terkait dengan aspek ekonomi, keamanan nasional, serta stabilitas kawasan. Adapun keterbaharuan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah diteliti sebelumnya adalah penelitian ini berfokus membahas strategi kebijakan luar negeri Singapura dalam mempertahankan stabilitas ekonomi negaranya dan Kawasan Asia Tenggara serta menjelaskan keterbaharuan kondisi ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Dengan menganalisis studi kasus Singapura, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kebijakan luar negeri negara-negara kecil di tengah rivalitas kekuatan besar, serta relevansinya dalam konteks hubungan internasional kontemporer.

Dalam kajian studi hubungan internasional terdapat teori serta perspektif atau paradigma yang berbeda dalam merumuskan serta menyikapi setiap fenomena internasional yang terjadi. Penelitian ini menggunakan perspektif realisme dalam Hubungan Internasional, dengan menekankan dua teori utama yakni *balance of power* dan teori *human security* sebagai alat analisis untuk memahami dilema kebijakan luar negeri Singapura dalam menghadapi rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina.

Realisme merupakan sebuah teori dalam Hubungan Internasional yang memandang sistem internasional sebagai sistem yang anarkis, dimana tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat mengatur negara. Realisme dalam sistem politik menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang diambil seringkali bersifat oportunis dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, sehingga penyelesaian masalah cenderung mengarah pada solusi yang pragmatis.

Balance of Power merupakan turunan dari teori Hubungan Internasional tradisional yang berkaitan dengan Realisme, dimana faktor power sangat menentukan dalam sebuah hubungan dengan negara lain. Teori *balance of power* merupakan teori yang di cetuskan oleh Stephen M. Walt, ia menjelaskan bahwa aliansi secara umum dilihat sebagai respon negara terhadap suatu ancaman (Siti Sarah et al., 2022). Tujuan dari kajian mengenai dilema kebijakan luar negeri adalah untuk memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi negara-negara ketika mereka berupaya merumuskan kebijakan luar negeri yang sejalan dengan konsep *Balance of Power*.

Human Security adalah sebuah konsep keamanan manusia yang pertama kali diperkenalkan oleh Human Development Report (UNDP) pada tahun 1994. Human Development Report (UNDP)

membagi konsep Human Security menjadi tujuh bagian, yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan lingkungan, keamanan kesehatan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik (Kusuma, 2022). Melalui teori ini penulis dapat mengkaji lebih dalam tentang bagaimana kebijakan luar negeri Singapura yang berfokus dalam keamanan, stabilitas regional dan pembangunan ekonomi agar hanya tidak berfokus pada ancaman militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif ditandai oleh tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap suatu fenomena yang sifatnya tidak memerlukan pengukuran kuantitatif, dimana fenomena tersebut memang tidak dapat diukur dengan angka (Abdussamad, 2021). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena dilema kebijakan luar negeri negara-negara Asia Tenggara, khususnya Singapura, dalam konteks rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Penelitian dilakukan secara daring dari rumah, dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui literatur terdahulu, seperti jurnal akademik, artikel ilmiah, buku, serta situs web yang relevan. Data dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan untuk menggali kerangka teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengakses data historis dan analisis dari peristiwa yang telah terjadi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menelaah dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber secara mendalam dan kritis. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dinamika kebijakan luar negeri secara holistik dalam konteks hubungan internasional kawasan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Singapura berada dalam posisi dilematis di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebagai negara dengan ketergantungan tinggi terhadap perdagangan internasional, Singapura menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok sebagai mitra dagang utama, sekaligus menjalin kemitraan strategis dalam bidang keamanan dan pertahanan dengan Amerika Serikat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu jalannya kebijakan luar negeri Singapura di tengah-tengah persaingan yang terjadi baik dari aspek ketergantungan ekonomi Singapura terhadap Cina yang merupakan mitra dagang terbesarnya dan ketergantungan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat. Perekonomian Singapura sangat bergantung pada perdagangan internasional, oleh karena itu Singapura harus menjaga keseimbangan dalam hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat dan Cina untuk mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan ekonominya.

Di tengah meningkatnya tensi perang dagang antara kedua negara adidaya, Singapura menghadapi tekanan untuk memilih sisi, namun tetap berpegang pada prinsip pragmatism dalam kebijakan luar negerinya. Singapura menolak untuk memihak dan lebih memilih mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik, serta mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan, yang mencerminkan orientasi kebijakan luar negeri yang adaptif dan realistis. Terdapat dua alasan utama mengapa sistem politik Singapura dapat mempertahankan kebijakan luar negerinya.

Pertama, karena Singapura menjalin hubungan kepentingan dengan negara-negara besar yang menyebabkan terjadinya pemerataan kekuatan regional. *Kedua*, karena Singapura merupakan negara termaju di kawasan regionalnya sehingga tidak ada efek campur tangan dari negara-negara di sekitarnya (Peng, 2022).

Penerapan tarif baru oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, termasuk Singapura, menandai meningkatnya ketegangan ekonomi global yang berdampak langsung pada neraca perdagangan dan stabilitas investasi Singapura. Meskipun terdampak, Singapura tidak mengambil langkah konfrontatif. Sebaliknya, pemerintah memilih strategi hedging, yaitu menjaga hubungan baik dengan kedua pihak sambil memperkuat ketahanan domestik melalui diversifikasi ekonomi, penguatan kerja sama regional melalui ASEAN, serta peningkatan investasi di sektor-sektor strategis seperti teknologi dan ekonomi hijau. Apabila kebijakan tersebut di contoh oleh negara-negara lain dapat menimbulkan konsekuensi global, terutama bagi negara-negara kecil seperti Singapura yang dikenakan tarif 10% oleh Amerika Serikat (CNN Indonesia, 2025a). menyatakan bahwa Singapura akan terus berhati-hati, meningkatkan kemampuan, serta mempererat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan yang serupa. Singapura merasa siap dibandingkan negara-negara lain dalam menghadapi situasi yang kompleks ini (CNN Indonesia, 2025b).

Terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina menciptakan ketidakpastian serta mengancam stabilitas perekonomian Singapura yang sangat bergantung pada jalannya perdagangan internasional. Maka dari itu, Singapura berusaha untuk hati-hati dalam merumuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan prinsip-prinsipnya untuk menjaga hubungan baik dengan kedua negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Sebagai pendukung utama sistem perdagangan multilateral berbasis aturan yang telah ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO), Singapura khawatir terjadinya perang dagang dengan keputusan sepihak dengan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh WTO dapat merusak sistem tersebut, yang akan berdampak secara signifikan bagi negara-negara kecil dan terbuka seperti Singapura. Maka dari itu, Singapura berusaha menjaga konsistensi dalam menjalankan kebijakan luar negerinya yang tidak berpihak kepada salah satu negara yang dapat membuat Singapura dapat bertahan di tengah persaingan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina.

Secara politik, orientasi domestik Singapura yang cenderung konservatif dan nasionalis memperkuat pendekatan pragmatis dalam politik luar negerinya. Pemerintah mengutamakan stabilitas dan kepentingan nasional dibanding ideologisasi kebijakan. Dominasi Partai Aksi Rakyat (PAP) dan birokrasi yang efisien memungkinkan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri.

Temuan tersebut memperkuat konsep bahwa negara kecil seperti Singapura cenderung memilih strategi multi-vector diplomasi untuk menjaga otonomi strategis di tengah rivalitas kekuatan besar. Dalam konteks teori hubungan internasional, kebijakan Singapura mencerminkan elemen realisme defensif dan neoliberalisme institusional, di mana negara kecil memaksimalkan peran institusi multilateral untuk melindungi kepentingannya. Dampak jangka panjang dari rivalitas ini tidak hanya berpengaruh pada Singapura, namun juga pada stabilitas kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara cenderung mengadopsi pendekatan pragmatis demi menjaga hubungan strategis dengan kedua negara besar dan menghindari polarisasi kawasan.

Kebijakan Luar Negeri Singapura Sebelum Terpengaruh Perang Dagang Antara Amerika Serikat-Cina

Sebelum meningkatnya intensitas perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina pada tahun 2018, kebijakan luar negeri Singapura berfokus pada strategi kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan kekuatan. Singapura tetap terlibat secara aktif dan menyeluruh dengan kedua negara besar tersebut demi melindungi kepentingan ekonominya dan menjamin keamanan nasional. Pendekatan ini memungkinkan Singapura untuk memelihara stabilitas kawasan Asia Tenggara serta menjamin kesejahteraan nasionalnya yang sangat bergantung pada hubungan dengan Amerika Serikat dan Cina.

Keseimbangan hubungan Singapura dengan Amerika Serikat tercermin dari kerja sama erat di bidang keamanan. Singapura mendukung keterlibatan AS di kawasan sebagai kekuatan penyeimbang dan penjamin stabilitas regional. Selain aspek keamanan, AS juga menjadi mitra penting dalam perdagangan dan investasi, meskipun peran ekonominya tidak sebesar Cina. Salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang signifikan adalah Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Singapura (USSFTA) yang berlaku sejak 2004, yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi bilateral serta mendorong arus perdagangan dan investasi yang lebih lancar.

Di sisi lain, kedekatan budaya dan sosial Singapura dengan Cina turut diperkuat oleh besarnya populasi etnis Tionghoa di dalam negeri. Meski demikian, pemerintah tetap menekankan identitas nasional Singapura yang multietnis sebagai upaya menjaga kohesi sosial. Dari segi ekonomi, Cina merupakan mitra dagang terbesar Singapura, dengan volume perdagangan dan investasi yang terus meningkat. Namun, meskipun hubungan ekonomi dengan Cina sangat erat, Singapura secara strategis berusaha menghindari ketergantungan tunggal dan tetap menjaga hubungan yang seimbang dengan kekuatan global lainnya, termasuk Amerika Serikat.

Secara keseluruhan, tujuan utama kebijakan luar negeri Singapura sebelum terjadinya perang dagang adalah untuk mengamankan stabilitas nasional dan mendorong kemakmuran ekonomi melalui prinsip-prinsip pragmatisme, netralitas, multilateralisme, serta kerja sama erat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam menjalin hubungan dengan AS dan Cina, Singapura mengadopsi pendekatan keseimbangan strategis dan keterlibatan menyeluruh, di mana aliansi keamanan dibangun bersama Amerika Serikat, sementara kemitraan ekonomi terus dikembangkan dengan Cina.

Kebijakan Luar Negeri Singapura yang Berangkat dari Rivalitas Perang Dagang Antara Amerika Serikat-Cina

Kebijakan luar negeri Singapura dalam menghadapi persaingan antara Amerika Serikat dan Cina, khususnya dalam konteks perang dagang, tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Negara tersebut tetap mempertahankan pendekatan pragmatis yang menjadi ciri khas kebijakan luarnya, bahkan cenderung semakin diperkuat. Hal ini tercermin dari sikap netral yang konsisten, di mana Singapura tidak memihak salah satu kekuatan besar. Pemerintah Singapura lebih memilih untuk mendorong penyelesaian konflik antara AS dan Cina melalui dialog dan penegakan aturan tatanan internasional yang berbasis hukum.

Meskipun secara historis Singapura memiliki kecenderungan pragmatis ke arah blok Barat, negara ini tetap mengedepankan kepentingan nasional dan stabilitas kawasan dengan menjaga hubungan baik secara seimbang dengan kedua negara besar tersebut. Sebagai respons terhadap potensi dampak negatif dari perang dagang, Singapura juga berupaya memperkuat ketahanan ekonominya

dengan memperluas kerja sama ekonomi, khususnya dengan negara-negara di Asia Tenggara. Walaupun demikian, Amerika Serikat dan Cina tetap menjadi mitra dagang utama bagi Singapura.

Untuk mengurangi ketergantungan pada perdagangan konvensional, Singapura terus mendorong transformasi ekonominya melalui investasi di sektor teknologi, inovasi, dan pengembangan ekonomi bernilai tambah tinggi. Selain itu, negara ini aktif mempromosikan dirinya sebagai pusat bisnis, keuangan, dan logistik yang andal, guna menarik perusahaan multinasional yang tengah mencari diversifikasi risiko geopolitik di tengah ketidakpastian global.

Singapura juga mempertahankan prinsip multilateralismenya dengan meningkatkan peran aktif dalam forum-forum internasional seperti ASEAN, APEC, dan WTO. Pemerintah percaya bahwa kerja sama internasional, perdagangan bebas dan adil, serta penyelesaian sengketa secara damai merupakan mekanisme terbaik bagi negara kecil seperti Singapura untuk melindungi kepentingan nasionalnya di tengah rivalitas kekuatan besar.

Walaupun tidak berpihak secara eksplisit, Singapura tetap menjaga hubungan erat dan jalur komunikasi terbuka dengan kedua belah pihak. Negara ini berperan sebagai fasilitator dialog dan mendorong kolaborasi di bidang-bidang yang menguntungkan semua pihak. Bagi Singapura, partisipasi aktif dan konstruktif merupakan strategi terbaik untuk mereduksi potensi konflik dan memperkuat stabilitas kawasan.

Dampak Jangka Panjang Perang Dagang Terhadap Singapura dan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara

Perang dagang yang terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Cina berpotensi memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi Singapura maupun negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial. Sebagai negara dengan ekonomi terbuka dan berfungsi sebagai pusat perdagangan global, Singapura sangat rentan terhadap gangguan perdagangan internasional. Ketegangan perdagangan antara dua kekuatan besar tersebut dapat menyebabkan penurunan permintaan ekspor dari Asia Tenggara, termasuk Singapura, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi kawasan yang sangat bergantung pada hubungan dagang dengan Amerika Serikat dan Cina (Sari et al., 2021).

Jika konflik ini terus berlanjut, gangguan terhadap rantai pasokan global sangat mungkin terjadi. Arus perdagangan dan investasi akan terhambat, dan perusahaan-perusahaan multinasional dapat mulai mencari lokasi alternatif untuk menghindari beban tarif tinggi serta ketidakpastian kebijakan. Lonjakan tarif perdagangan yang tidak dapat dielakkan dapat menyebabkan inflasi di berbagai negara kawasan akibat meningkatnya harga barang impor dari AS atau Cina, sehingga melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi domestik, termasuk di Singapura.

Persaingan geopolitik ini juga menimbulkan dilema diplomatik bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Singapura, yang harus menjaga hubungan baik dengan kedua negara adidaya. Kondisi ini mendorong mayoritas negara di kawasan untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang bersifat pragmatis demi menjaga stabilitas hubungan bilateral. Di sisi lain, ketegangan ini turut memperuncing polarisasi politik di kawasan, dengan sebagian negara menunjukkan kecenderungan kepada Amerika Serikat, sementara lainnya lebih dekat ke Cina karena kepentingan ekonomi. Meskipun demikian, Singapura tetap mempertahankan prinsip-prinsip netralitas dan pragmatisme dalam kebijakan luar negerinya guna menjaga keseimbangan diplomatik.

Selain itu, eskalasi perang dagang juga mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk lebih menekankan pada pembangunan ekonomi domestik, seperti memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, langkah ini dapat memperlambat integrasi ekonomi kawasan serta menghambat agenda kerja sama regional, termasuk melalui kerangka ASEAN. Di sektor manufaktur dan ekspor, ketergantungan tinggi terhadap pasar Amerika Serikat dan Cina dapat meningkatkan angka pengangguran serta memperparah ketimpangan sosial dan menurunkan ketersediaan lapangan kerja, terutama di negara-negara yang bergantung pada sektor ekspor.

Tak hanya berdampak pada bidang ekonomi dan sosial, konflik yang berlarut-larut antara AS dan Cina juga berpotensi mengalihkan perhatian negara-negara Asia Tenggara dari isu-isu global lainnya, seperti perubahan iklim. Fokus yang terlampaui besar pada kestabilan ekonomi dapat membuat negara-negara ini enggan menerapkan kebijakan lingkungan yang tegas, terutama jika kebijakan tersebut dianggap merugikan sektor perdagangan. Dengan demikian, perang dagang yang terus berlangsung akan menciptakan ketidakpastian multidimensional di kawasan Asia Tenggara, mencakup sektor ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Singapura dalam menghadapi rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan refleksi dari pendekatan yang pragmatis dan adaptif. Singapura berhasil mempertahankan hubungan strategis dengan kedua negara adidaya tersebut tanpa secara eksplisit memihak salah satu, demi menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan nasional, khususnya di bidang ekonomi dan keamanan.

Dilema yang dihadapi Singapura sebagai negara kecil dengan ketergantungan tinggi terhadap perdagangan global mendorongnya untuk menerapkan strategi hedging menjaga hubungan baik dengan semua pihak sembari memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Dalam konteks persaingan dagang Amerika Serikat-Cina, Singapura menunjukkan keteguhan dalam menjaga kedaulatan kebijakan luar negerinya, sekaligus aktif mendorong penyelesaian damai melalui diplomasi multilateral, khususnya lewat forum-forum kawasan seperti ASEAN.

Secara akademis, temuan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman strategi diplomasi negara kecil di tengah rivalitas kekuatan besar, serta memperkaya studi hubungan internasional, khususnya dalam penerapan teori realisme defensif, neoliberalisme institusional, dan strategi kebijakan luar negeri negara kecil. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan luar negeri di kawasan Asia Tenggara dalam merumuskan pendekatan yang fleksibel namun konsisten terhadap dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), *Syakir Media Press*. Syakir Media Press. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- CNN Indonesia. (2025a). *Pernyataan Lengkap PM Singapura Hadapi Perang Dagang Trump*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250408162413-106-1216849/ Pernyataan-lengkap-pm-singapura-hadapi-perang-dagang-trump>

- CNN Indonesia. (2025b). *Singapura Siap-siap Hadapi Banyak “Guncangan” soal Tarif Impor Trump*.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250405035617-106-1215960/singapura-siap-siap-hadapi-banyak-guncangan-soal-tarif-impor-trump>
- Kusuma, A. S. (2022). *Human Security Dalam Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*. 1–25.
<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink>
- Peng, X. (2022). *Singapore ’ s Diplomatic Dilemma Under US-China Competition*. 41–48.
https://doi.org/10.2991/978-2-494069-89-3_6
- Sari, M., Marselina, & Aida, N. (2021). Perang Dagang AS-Cina: Dampak Ekonomi Pada Negara Mitra Dagang AS-Cina. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Volume 21(2), 132–144. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/7518/pdf_160
- Siti Sarah, Widodo, & Yusnaldi. (2022). Strategi Balance of Power Indonesia Dalam “Perang Dingin” Antara Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan. *Defendonesia*, 6(1), 48–57.
<https://doi.org/10.54755/defendonesia.v6i1.115>